

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan baik itu struktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro, 2000).

Salah satu alternatif untuk menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui Pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*). Pertumbuhan ekonomi manakala diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya.

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi, baik ke dalam maupun ke luar. Apabila dilihat secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi tersebut (Tarigan, 2004).

Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi dapat dimulai dari beberapa sektor yang dinamis dan mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiplier effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Kriteria pusat pertumbuhan, yaitu sebagai daerah cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan, dan mempunyai interaksi ekonomi dengan daerah belakangnya (Tarigan, 2004).

Di dalam melaksanakan kebijaksanaan pengembangan wilayah dapat diamati bahwa, selama dua dekade terakhir, konsep kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan telah digunakan baik di Negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Konsep tersebut dipakai untuk memacu perkembangan daerah terbelakang melalui pemusataan investasi dalam suatu daerah tertentu, sehingga terjadi keuntungan ekonomi atau aglomerasi pada daerah pengaruhnya (Hansen dan Richardson dalam Muta'ali, 1999).

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan lahan pertanian (Gadang, 2010).

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian daerahnya tersebut adalah dengan mengembangkan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan.

Adanya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang juga akan diikuti oleh pembangunan wilayah. Dalam rangka pengembangan wilayah tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu melihat dan menentukan wilayah-wilayah mana yang secara ekonomi, sosial dan kultural memiliki potensi untuk dikembangkan, baik yang secara alami sudah dimiliki oleh wilayah tersebut maupun akibat pembangunan selama ini. Daerah kecamatan yang ada pada tiap kota atau kabupaten dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan selain itu juga

pendekatan ruang lingkup kecamatan dimaksudkan agar pemerataan pembangunan antar kecamatan dapat lebih merata, dengan memperhatikan juga sektor pertanian yang ada di setiap kecamatan, agar nantinya kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan dapat mengembangkan sektor pertaniannya, yang memiliki distribusi paling besar dalam perekonomian daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif, optimal dan berkelanjutan. Dimana tujuannya adalah untuk pemeratakan pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah (Adisasmita, 2008).

Menurut Sjafrizal (2012), salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah adalah dengan mengembangkan wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*) secara menyebar. Adanya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang juga akan diikuti oleh pembangunan wilayah. Kegiatan tersebut berupa pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial sehingga secara alami kondisi tersebut dapat meningkatkan daya tarik daerah (Pebrina, 2005).

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat dengan Ibukota Batusangkar. Dengan luas wilayah 1.336 Km² dan terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat 2009-2029 terdapat penentuan pusat kegiatan lokal, salah satunya adalah Kabupaten Tanah Datar. Pusat Kegiatan Lokal yakni kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan (Bappeda Sumbar, 2009).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan rencana pengembangan kawasan metropolitan di enam kabupaten di Sumatera Barat, antara lain : Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, Limapuluh Kota, Padang

Panjang dan Tanah Datar. Enam kabupaten dan kota ini akan saling dukung untuk mewujudkan pembangunan terpadu kawasan. Pada tahap awal program pembangunan tersebut akan difokuskan pada infrastruktur yang saling tersambung dan menunjang antara masing-masing kabupaten dan kota. Selanjutnya, akan diteruskan pada program lain seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam rencana kawasan pengembangan kawasan metropolitan (antarasumbar, Senin, 24 Juli 2017 22:13 WIB). Berdasarkan struktur dan perkembangan kabupaten, di Sumatera Barat terbagi atas beberapa tipologi, yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah cepat berkembang, dan daerah relatif tertinggal. (Lampiran 1).

Kabupaten Tanah Datar termasuk ke dalam tipologi daerah relatif tertinggal, oleh sebab itu perlu di tentukan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Tanah Datar agar dapat memacu perkembangan daerah tersebut dan terjadi pemerataan perekonomian di setiap kecamatan yang ada, melalui pemusatan investasi dalam suatu daerah tertentu, sehingga terjadi keuntungan ekonomi atau aglomerasi pada daerah pengaruhnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah dari berbagai lapangan usaha maupun untuk melihat karakteristik penyebaran perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Tanah Datar, peranan terbesar terhadap PDRB masih pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari proporsi sektor tersebut terhadap nilai total PDRB Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 mencapai 31,13 persen, terjadi sedikit penurunan dibandingkan pada tahun 2015 yang tercatat sebesar 32,37 persen. Dapat dilihat dari distribusi PDRB Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan stuktur ekonomi (Lampiran 2).

Sektor pertanian yang ada di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 5 sub sektor, yaitu subsektor tanaman pangan dan hortikultura dan subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan(Lampiran 3). Dari 5 subsektor pertanian yang ada di Kabupaten Tanah

Datar, terdapat 2 subsektor yang memiliki nilai distribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar, yakni subsektor tanaman pangan dan hortikultura, serta subsektor perkebunan. Pengoptimalan potensi sektor pertanian dapat dilakukan dengan penentuan prioritas pengembangan komoditi pertanian yang menjadi basis di Kabupaten Tanah Datar. Berbagai komoditi pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Tanah Datar belum tentu semuanya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Komoditi-komoditi pertanian yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan diharapkan dapat menjadi sektor pertanian sebagai pendorong perkembangan sektor perekonomian lainnya sehingga pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan diketahuinya komoditi pertanian pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan pada Kabupaten Tanah Datar.

Berangkat dari hal tersebut, maka kecamatan – kecamatan yang ada pada Kabupaten Tanah Datar dinilai perlu diidentifikasi untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Sehingga, dengan keberadaan pusat-pusat pertumbuhan yang baru, hasil pembangunan serta ekonominya mempunyai efek menyebar dan terjadi pemerataan di setiap kecamatan. Hingga saat ini belum ada kajian akademis mengenai potensi kecamatan - kecamatan di Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat pertumbuhan. Cakupan ruang lingkup kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan agar pemerataan pembangunan antar-kecamatan dapat lebih merata.

Oleh sebab itu penelitian ini berjudul: **Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dan Komoditi Basis Di Kabupaten Tanah Datar.**

Dari uraian masalah diatas maka timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Kecamatan-kecamatan mana saja yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan daerah di Kabupaten Tanah Datar?
2. Komoditi pertanian apa saja yang menjadi komoditi pertanian basis di masing – masing kecamatan di Kabupaten Tanah Datar ?
3. Bagaimana interaksi (Tingkat keterkaitan antara pusat pertumbuhan (*growth centre*) dan daerah sekitarnya (*hinterland*) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan mana saja yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan daerah di Kabupaten Tanah Datar .
2. Menganalisis komoditi pertanian basis di masing-masing kecamatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2016.
3. Mengidentifikasi interaksi (tingkat keterkaitan antara pusat pertumbuhan (*growth pole*) dan daerah sekitarnya (*hinterland*)).

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengembangan daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian terkait dengan pusat pertumbuhan dalam pengembangan daerah.
3. Bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapat selama masa perkuliahan.

